

## **Peran Kepolisian dalam Upaya Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Tanjung Jabung Timur**

<sup>1</sup>Rajali, <sup>2</sup>Kurniawan, <sup>3</sup>Sarwono

*Corresponding Author:* [Rajalijambi4@gmail.com](mailto:Rajalijambi4@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh kepolisian di Tanjung Jabung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh kepolisian, termasuk sosialisasi bahaya kebakaran, patroli rutin, dan penerapan teknologi informasi untuk pemantauan. Kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap kebakaran. Namun, tantangan dalam penegakan hukum, keterlibatan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya masih perlu diatasi. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya penguatan kolaborasi, dukungan dari pemerintah, serta peningkatan keterlibatan media dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya mitigasi kebakaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan strategi penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Penanggulangan kebakaran, kolaborasi, kepolisian, masyarakat, Tanjung Jabung Timur.*

### **PENDAHULUAN**

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius di Indonesia, termasuk di wilayah Tanjung Jabung Timur. Fenomena ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan perubahan iklim. Tanjung Jabung Timur, yang kaya akan sumber daya alam, menjadi daerah yang rentan terhadap kebakaran lahan, terutama pada musim kemarau. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang efektif untuk mengurangi risiko dan dampak kebakaran (Asiri, 2020).

Kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Jabung Timur seringkali disebabkan oleh praktik pembukaan lahan secara ilegal dan pembakaran lahan untuk pertanian. Praktik ini, meskipun ilegal, masih dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai cara untuk mengelola lahan secara cepat dan murah. Hasil wawancara dengan petani lokal menunjukkan bahwa banyak dari mereka memilih cara ini karena kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari kebakaran. Tanpa intervensi yang tepat, praktik ini akan terus berlanjut dan berkontribusi terhadap masalah kebakaran.

Peran kepolisian menjadi sangat penting dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Muzaki et.al, 2021). Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan ilegal yang dapat memicu kebakaran (Santriana, 2023). Namun, tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan tugas ini cukup kompleks. Terbatasnya sumber daya dan personel sering kali menghambat efektivitas tindakan yang dapat diambil untuk mencegah kebakaran.

Salah satu langkah awal yang dapat diambil oleh kepolisian adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan (Hidayat, 2022). Edukasi yang tepat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebakaran, serta mendorong mereka untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Dengan melakukan pendekatan preventif, kepolisian dapat membantu mengurangi angka kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut (Rais & Erdianto, 2022).

Selain sosialisasi, kepolisian juga perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kerja sama ini dapat menghasilkan sinergi yang lebih kuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga dapat

meningkatkan efektivitas program mitigasi dan meningkatkan kapasitas respons terhadap kejadian kebakaran (Marbun & Supriatna, 2024).

Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dari peran kepolisian. Dalam beberapa kasus, tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan ilegal dapat menjadi deterrent yang efektif. Namun, tantangan dalam penegakan hukum di Tanjung Jabung Timur adalah adanya keterbatasan dalam sistem hukum yang dapat menindak tegas pelanggar. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat sistem hukum dan prosedur penegakan yang lebih efektif.

Penggunaan teknologi juga dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan efektivitas upaya mitigasi kebakaran (Dewanti et.al, 2020). Penerapan teknologi informasi, seperti pemantauan satelit dan aplikasi berbasis lokasi, dapat membantu kepolisian dalam mendeteksi titik panas dan mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Dengan informasi yang akurat dan cepat, respons terhadap kebakaran dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Di samping itu, kondisi geografis dan iklim di Tanjung Jabung Timur juga berperan dalam frekuensi terjadinya kebakaran. Musim kemarau yang panjang dan intensitas hujan yang rendah dapat meningkatkan risiko kebakaran (Samidjo & Suharso, 2017). Oleh karena itu, analisis tentang pola cuaca dan perubahan iklim di daerah ini juga perlu diperhatikan dalam upaya mitigasi. Informasi ini dapat membantu kepolisian dan pihak terkait dalam merencanakan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.

Masyarakat lokal juga memiliki peran penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Keterlibatan masyarakat dalam program-program mitigasi, seperti patroli kebakaran dan penanaman pohon, dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam program semacam itu lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan cenderung menghindari praktik pembakaran (Fauzi, 2024).

Namun, tantangan dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat tidaklah sederhana. Beberapa masyarakat mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai praktik pembakaran lahan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan oleh kepolisian haruslah inklusif dan menghormati budaya setempat. Dialog yang terbuka dan partisipatif antara kepolisian dan masyarakat dapat membantu mencapai kesepakatan mengenai cara-cara terbaik untuk mengelola lahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran kepolisian dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Jabung Timur. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi mitigasi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah kebakaran di wilayah tersebut. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan kebakaran.

Secara keseluruhan, kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Jabung Timur adalah masalah yang kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Dengan memfokuskan perhatian pada peran kepolisian, penting untuk mengidentifikasi strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Tanjung Jabung Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Jabung Timur. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota kepolisian, pejabat pemerintah daerah, serta masyarakat setempat yang terlibat dalam program mitigasi. Selain itu, observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk mengamati praktik-praktik mitigasi yang diterapkan dan interaksi antara kepolisian dengan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang akan mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara dan observasi. Data

yang terkumpul akan diproses melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas peran kepolisian dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan, serta memberikan rekomendasi untuk strategi mitigasi yang lebih baik di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Tindakan Preventif Kepolisian dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan**

Tindakan preventif kepolisian dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan merupakan langkah krusial yang harus diambil untuk melindungi lingkungan dan masyarakat di Tanjung Jabung Timur. Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan anggota kepolisian menunjukkan bahwa mereka telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kebakaran, termasuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan. Melalui program-program edukasi, kepolisian berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghindari praktik pembakaran lahan yang ilegal.

Sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian mencakup penyuluhan tentang dampak negatif dari kebakaran hutan, tidak hanya terhadap ekosistem tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat (Lesmana et.al, 2023). Dalam kegiatan ini, kepolisian menggandeng pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan informasi yang komprehensif. Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami risiko dan bahaya dari kebakaran hutan, yang berdampak pada perubahan perilaku dalam mengelola lahan.

Selain sosialisasi, kepolisian juga menerapkan patroli rutin di daerah rawan kebakaran. Berdasarkan wawancara dengan petugas kepolisian, patroli dilakukan untuk memantau aktivitas yang mencurigakan dan mencegah pembakaran lahan. Dengan kehadiran polisi di lapangan, masyarakat merasa lebih terawasi dan cenderung menghindari praktik pembakaran. Patroli ini juga berfungsi sebagai tindakan deterrent terhadap pelaku yang berencana melakukan pembakaran (Teja, 2020).

Tindakan preventif lainnya adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kepolisian telah menindak tegas praktik-praktik ilegal yang dapat menyebabkan kebakaran. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pesan moral kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada. Hasil survei menunjukkan bahwa 75% responden menganggap tindakan hukum yang diambil oleh kepolisian dapat mengurangi niat mereka untuk melakukan pembakaran lahan.

Kepolisian juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pencegahan kebakaran. Misalnya, mereka terlibat dalam pembuatan regulasi lokal yang melarang pembakaran lahan tanpa izin. Hasil wawancara dengan pejabat pemerintah daerah mengungkapkan bahwa kolaborasi ini penting untuk menyusun langkah-langkah yang lebih efektif dalam mitigasi kebakaran. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat lebih patuh dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Penggunaan teknologi juga menjadi salah satu inovasi yang diterapkan oleh kepolisian dalam tindakan preventif. Pemantauan menggunakan satelit untuk mendeteksi titik panas menjadi salah satu strategi yang efisien. Melalui teknologi ini, kepolisian dapat mendeteksi potensi kebakaran sejak dini dan mengambil langkah cepat sebelum api meluas. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi telah meningkatkan respons kepolisian terhadap kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat meminimalkan kerugian yang ditimbulkan.

Sistem informasi juga diperkuat dengan penerapan aplikasi yang memungkinkan masyarakat melaporkan kebakaran secara langsung kepada kepolisian. Aplikasi ini mempermudah komunikasi antara masyarakat dan aparat, sehingga informasi mengenai kebakaran dapat diterima dengan cepat. Berdasarkan survei, 80% responden menyatakan bahwa mereka merasa lebih mudah

melaporkan kejadian kebakaran melalui teknologi, yang menunjukkan bahwa inovasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.

Namun, meskipun telah banyak dilakukan, tantangan dalam tindakan preventif kepolisian tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran yang dialokasikan untuk program pencegahan kebakaran. Hasil wawancara dengan petugas kepolisian mengungkapkan bahwa keterbatasan ini seringkali menghambat efektivitas tindakan yang diambil. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kepolisian dalam menjalankan tugas ini.

Kendala lain yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menjaga hutan dan lahan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, tidak semua masyarakat memahami dan menginternalisasi pesan yang disampaikan. Hasil survei menunjukkan bahwa 60% responden masih melakukan pembakaran lahan meskipun telah mendapat informasi mengenai bahaya kebakaran. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dalam konteks kolaborasi, peran lembaga non-pemerintah juga sangat penting dalam mendukung tindakan preventif kepolisian. Kerja sama antara kepolisian dan organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan kebakaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa organisasi telah melakukan program penyuluhan di tingkat desa, yang melengkapi upaya kepolisian. Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

Secara keseluruhan, tindakan preventif kepolisian dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Jabung Timur menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Penerapan sosialisasi, patroli, penegakan hukum, dan teknologi telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan menekan angka kebakaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan tindakan preventif tidak hanya bergantung pada kepolisian, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama antar lembaga. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas kepolisian dalam hal sumber daya dan pelatihan, serta penguatan regulasi yang mengatur pembakaran lahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di Tanjung Jabung Timur.

### **Kolaborasi antara Kepolisian dan Masyarakat dalam Mitigasi Kebakaran**

Kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam mitigasi kebakaran di Tanjung Jabung Timur merupakan aspek yang sangat penting untuk menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan yang kian meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan kolaboratif, seperti sosialisasi tentang bahaya kebakaran, telah dilakukan oleh kepolisian dengan melibatkan tokoh masyarakat. Melalui program edukasi ini, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak dari kebakaran dan langkah-langkah pencegahannya. Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi ini sangat tinggi, yang mencerminkan minat mereka untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan.

Selain sosialisasi, kepolisian juga melaksanakan patroli bersama dengan masyarakat di daerah rawan kebakaran. Keterlibatan masyarakat sebagai relawan dalam patroli ini menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan anggota masyarakat dalam patroli meningkatkan pengawasan dan menciptakan rasa aman, serta mengurangi potensi praktik pembakaran lahan ilegal. Kegiatan penghijauan yang dilakukan secara bersama juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Dalam upaya mitigasi, kepolisian memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat (Al Faraby, 2024). Melalui aplikasi pelaporan kebakaran, masyarakat dapat melaporkan kejadian secara langsung, sehingga informasi dapat disampaikan dengan cepat.

Analisis data menunjukkan bahwa sistem pelaporan ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat, dan respon terhadap insiden kebakaran menjadi lebih efisien. Namun, tantangan dalam edukasi masyarakat mengenai cara pencegahan kebakaran masih menjadi kendala utama, dengan sekitar 60% responden tidak mengetahui langkah-langkah yang tepat.

Membangun hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat juga sangat krusial. Keterlibatan polisi dalam kegiatan sosial di masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama. Dengan membina hubungan yang positif, masyarakat akan lebih cenderung untuk berkolaborasi dan melaporkan aktivitas ilegal yang dapat menyebabkan kebakaran. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat kolaborasi ini, terutama dalam hal kebijakan dan anggaran untuk program mitigasi kebakaran.

Media juga berperan penting dalam mempromosikan kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat. Pemberitaan mengenai kegiatan kolaboratif ini mendapatkan perhatian positif dari publik, sehingga dapat menginspirasi lebih banyak individu untuk terlibat dalam mitigasi kebakaran. Evaluasi program kolaborasi menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, di mana umpan balik dari masyarakat dapat digunakan untuk menyesuaikan pendekatan yang diambil.

Keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam kolaborasi ini memberikan dampak positif, karena mereka dapat membantu mengedukasi masyarakat dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan program mitigasi. Pentingnya tindakan berkelanjutan dalam kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat menjadi sorotan utama, karena kesinambungan dalam kegiatan mitigasi sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan melakukan berbagai tindakan kolaboratif, kesadaran akan risiko kebakaran dapat meningkat, dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan dapat terbangun.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam mitigasi kebakaran di Tanjung Jabung Timur menunjukkan potensi yang besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas, dukungan kebijakan, dan keterlibatan media dalam upaya mitigasi kebakaran yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mitigasi kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

### **Evaluasi Efektivitas Strategi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Kepolisian**

Evaluasi efektivitas strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh kepolisian di Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadapi masalah kebakaran yang terus meningkat. Salah satu langkah awal yang krusial adalah sosialisasi mengenai bahaya kebakaran dan praktik pembakaran lahan ilegal. Program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga terkait telah berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang dampak kebakaran serta cara pencegahannya (Mangngasing, 2023). Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan praktik-praktik berisiko dapat diminimalisir.

Patroli rutin yang dilaksanakan oleh kepolisian juga menjadi komponen penting dalam pencegahan kebakaran. Patroli di daerah rawan kebakaran meningkatkan pengawasan dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai relawan dalam patroli menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan, sehingga keberadaan polisi di lapangan berfungsi sebagai deterrent bagi pelaku yang berencana melakukan pembakaran lahan ilegal. Tindakan ini mencerminkan efektivitas kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam mengurangi potensi kebakaran.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum masih menjadi kendala utama. Banyak pelanggaran terkait pembakaran lahan yang tetap terjadi, dan penegakan hukum yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebabnya (Ansar et.al, 2024). Keterbatasan sumber daya dan

personel sering kali menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga perlu ada dukungan lebih dalam hal sumber daya untuk meningkatkan kapasitas kepolisian dalam menjalankan tugas ini. Dengan penegakan hukum yang lebih konsisten, diharapkan dapat menurunkan niat masyarakat untuk melakukan pembakaran.

Penggunaan teknologi informasi juga menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan respons kepolisian terhadap kebakaran. Penerapan sistem pemantauan berbasis satelit untuk mendeteksi titik panas menjadi salah satu inovasi yang diimplementasikan. Teknologi ini telah meningkatkan kecepatan respons kepolisian dalam menghadapi kebakaran, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Dengan adanya sistem pemantauan yang efektif, kepolisian dapat lebih proaktif dalam tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Keterlibatan masyarakat dalam program pelatihan dan pembentukan kelompok pemadam kebakaran sukarela menunjukkan peran signifikan masyarakat dalam mitigasi kebakaran. Partisipasi aktif masyarakat dalam program ini mencerminkan adanya kesadaran dan komitmen terhadap lingkungan. Kegiatan pemadaman yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi kebakaran, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dalam menjaga lingkungan.

Meskipun banyak upaya positif yang telah dilakukan, tantangan dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat secara keseluruhan masih ada. Beberapa masyarakat mungkin masih kurang memahami pentingnya peran mereka dalam pencegahan kebakaran. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai risiko kebakaran dan langkah-langkah pencegahan yang tepat.

Hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat juga sangat krusial dalam upaya mitigasi. Keterlibatan polisi dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi. Dengan membina hubungan yang positif, masyarakat akan lebih cenderung untuk berkolaborasi dan melaporkan aktivitas ilegal yang dapat menyebabkan kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis pada dialog terbuka antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program mitigasi kebakaran.

Dukungan dari pemerintah daerah juga berperan penting dalam kelangsungan kolaborasi ini. Kebijakan yang mendukung program-program mitigasi kebakaran yang melibatkan masyarakat dapat memberikan landasan yang kuat untuk kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat. Dukungan ini termasuk dalam bentuk alokasi anggaran untuk program-program yang relevan dan pelatihan bagi anggota kepolisian serta masyarakat. Peran media dalam mempromosikan kolaborasi ini tidak dapat diabaikan. Pemberitaan mengenai kegiatan kolaboratif antara kepolisian dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mitigasi kebakaran. Media dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang positif mengenai hasil kerja sama tersebut, sehingga mendorong lebih banyak individu untuk terlibat dalam upaya pencegahan kebakaran.

Evaluasi terhadap program kolaborasi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Melalui evaluasi yang sistematis, kedua pihak dapat menilai efektivitas strategi yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Dengan umpan balik yang konstruktif, kepolisian dan masyarakat dapat bersama-sama mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas program mitigasi.

Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh kepolisian di Tanjung Jabung Timur menunjukkan hasil yang bervariasi. Meskipun terdapat keberhasilan dalam banyak aspek, tantangan dalam penegakan hukum, keterlibatan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya tetap memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dan penguatan kolaborasi harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan mitigasi yang lebih efektif. Dengan demikian, kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam mitigasi kebakaran di Tanjung Jabung Timur menunjukkan potensi yang besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Melalui strategi yang terencana dan keterlibatan semua pihak,

diharapkan mitigasi kebakaran hutan dan lahan dapat lebih optimal dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Evaluasi efektivitas strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh kepolisian di Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran, pengawasan, dan tindakan preventif terhadap kebakaran. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti sosialisasi, patroli, dan penggunaan teknologi informasi, tantangan dalam penegakan hukum, keterlibatan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya masih perlu diatasi. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi, dukungan dari pemerintah, serta keterlibatan media dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mitigasi kebakaran, sehingga dapat melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansar, S. S. A., Rahmawati, A., & Arrahman, R. D. (2024). Peninjauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11-11.
- Asiri, L. (2020). Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(2), 28-40.
- Muzaki, A., Pratiwi, R., & Zahro, S. R. A. (2021). Pengendalian kebakaran hutan melalui penguatan peran polisi kehutanan untuk mewujudkan sustainable development goals. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(1), 22-44.
- Santriana, S. (2023). Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Thengkyang*, 8(2), 116-125.
- Hidayat, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Penyebab Kebakaran Hutan Serta Lahan Di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan (Laporan Polisi Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota). *Unes Journal of Suara Justisia*, 6(3), 239-249.
- Rais, S., & Erdianto, E. (2022). Kebijakan non penal dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan oleh kepolisian daerah riau berbasis teknologi aplikasi dashboard lancang kuning dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana pembakaran lahan dan hutan. *Ekssekusi*, 4(1), 22-52.
- Marbun, W., & Supriatna, A. (2024). STRATEGI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM MITIGASI BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA (Doctoral dissertation, IPDN).
- Dewanti, M., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Analisa efektifitas bank sampah sebagai alternatif pengelolaan sampah dalam mencapai smart city di kabupaten kulon progo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 21-29.
- Samidjo, J., & Suharso, Y. (2017). Memahami pemanasan global dan perubahan iklim. *Online Journal of Ivet University*, 24(2), 36-46.
- Fauzi, A. (2024). PEMAHAMAN DAN PENERAPAN ETIKA LINGKUNGAN SISWA SMP DI SALATIGA. In *Proceeding Seminar Nasional IPA* (pp. 75-84).
- Lesmana, E., Saam, Z., Zulkarnaini, Z., & Fitmawati, F. (2023, December). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan di Taman Nasional Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (pp. 56-61).

- Teja Bagus Bintara, T. B. B. (2020). Kajian Kriminologis Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur dan Kebijakan Penanggulangannya (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Al Faraby, A. H. (2024). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKA (TTE) DI INDONESIA (Suatu Kajian Dari Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)). *Meraja journal*, 7(1), 48-62.
- Mangngasing, N., Haryono, D., Nuraisyah, N., Nasrullah, N., & Indriani, N. (2023). Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Sarjo. *Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS)*, 2(2), 49-62.
- Ansar, S. S. A., Rahmawati, A., & Arrahman, R. D. (2024). Peninjauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11-11.
- Sari, Y., & Fitria, A. (2023). Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Dampaknya Terhadap Ekosistem di Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ekologi dan Lingkungan*, 15(3), 201-213.
- Ramli, D. (2022). Dampak Kebakaran Lahan terhadap Kesehatan Masyarakat di Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(4), 102-116.
- Surya, M., & Hilda, I. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Kebakaran Hutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(2), 45-60.
- Wira, S., & Lestriani, F. (2021). Pembentukan Kebijakan dan Penegakan Hukum untuk Mengatasi Kebakaran Lahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Lingkungan*, 9(1), 34-47.
- Kamal, A., & Syarif, M. (2023). Kolaborasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 79-92.
- Kusumawati, D., & Suryani, D. (2022). Penerapan Teknologi Satelit dalam Mendeteksi Titik Panas Kebakaran Lahan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 13(2), 55-68.